

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka

mencapai visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Kerjasama Standardisasi internasional adalah melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kerjasama kelembagaan standardisasi di Nasional.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program di bidang kerjasama standardisasi nasional lintas sektoral dan daerah;
2. Pelaksanaan kerjasama pembinaan standardisasi dalam negeri lintas sektoral dan daerah, melaksanakan tugas kesekretariatan Panitia Nasional (PANNAS) dan Kelompok Kerja (POKJA) untuk bidang kerjasama standardisasi yang terkait dengan operasional kegiatan standardisasi dalam negeri;

3. Sinkronisasi program kegiatan kerjasama standardisasi dalam negeri, dengan kegiatan standardisasi tingkat regional, multilateral dan internasional;
4. Pembinaan sumber daya pelaksana kegiatan dalam rangka kerjasama standardisasi dalam negeri;
5. Pelayanan jasa dalam bidang prasarana standardisasi;
6. Pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama standardisasi dalam negeri

Struktur Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1
Struktur Organisasi Pusat Kerjasama Standardisasi



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subbidang Kerjasama Teknis Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program di bidang kerjasama standardisasi lintas sektoral dan daerah, kerjasama dan pembinaan standardisasi lintas sektoral dan daerah, kegiatan dan keanggotaan standardisasi internasional dan regional, pembentukan kelompok peneliti (fungsional) dalam rangka kerjasama standardisasi, pengembangan sistem, mekanisme dan prosedur kerjasama lintas sektoral, urusan kesekretariatan Panitia Nasional dan

Kelompok Kerja hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan lintas sektoral dan daerah.

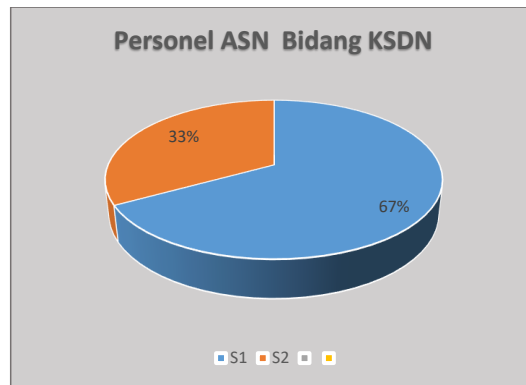
2. Subbidang Kerjasama Prasarana Standardisasi Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan program kerjasama prasarana perdagangan, koordinasi dan harmonisasi prasarana perdagangan dalam negeri dengan persyaratan internasional, pemberian jasa dalam persiapan dan pembinaan SDM dalam rangka kegiatan persiapan prasarana perdagangan dengan daerah, perintisan dan realisasi perjanjian perdagangan.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak (6) enam orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1
Personel ASN Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		D3	S1	S2	S3	
1.	Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri	-	1	-	-	1
2.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Teknis Standardisasi	-	-	1	-	1
3.	Analisis Kerjasama Teknis Standardisasi	-	1	-	-	1
4.	Kepala Sub Bidang Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	-	1	-	1
5	Analisis Kerjasama Kerjasama Prasarana Standardisasi	-	2	-	-	2
Jumlah		-	4	2	-	6



Gambar I.2
Grafik Personel ASN Bidang Kerjasama Dalam Negeri

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melakukan pengembangan kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan teknis yang dilakukan oleh Unit – unit di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Dimana bidang Kerjasama Standardisasi dalam Negeri mempunyai peran Strategis dalam memfasilitasi pengembangan dan implementasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditingkat Nasional. Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri pada selama tahun 2017 telah menjalin kerjasama dengan 10 mitra kerjasama/Stakeholder yaitu;

1. Universitas Lambung Mangkurat
2. Universitas Indraprasta PGRI

3. Universitas Islam Malang
4. Universitas Tanjung Pura
5. Universitas Syiah Kuala
6. Universitas Nasional
7. Universitas Muhammadiyah Kupang
8. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
9. PT. Kereta Api Indonesia (KAI)
10. BNSP, BIG dan KAN
11. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Nasional 2015-2019 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2017, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017, serta dilakukan Evaluasi Pencapaian atas Penetapan Kinerja Tahun 2017.

II.1.1 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan aktivitasnya, Bidang Kerjasama Standardisasi berpedoman pada Misi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi 2015-2019 sebagai berikut:

VISI

Menjadi unit kerja BSN yang terpercaya dalam memfasilitasi kerjasama standardisasi untuk mendukung terakomodasinya kepentingan Indonesia di tingkat internasional.

MISI

1. Penguatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama Standardisasi di dalam negeri, bilateral, regional dan internasional

2. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat *Notification Body* dan *Enquiry Point* untuk pemenuhan Perjanjian TBT-WTO
3. Penguatan fungsi PKS sebagai sekretariat ISO dan IEC, ACCSQ, APEC SCSC dan PASC.
4. Penguatan fungsi *Sponsoring Authority*.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional dirumuskan lima tahun yang teruang dalam Renstra PKS 2015-2019 serta Renstra BSN. Rumusan tujuan Pusat Kerjasama Standardisasi adalah sebagai berikut :

TUJUAN

1. Meningkatnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan internasional.
2. Meningkatnya pengembangan standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Meningkatnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Meningkatnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Meningkatnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Kerjasama Standardisasi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Kerjasama dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan

target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2015-2019 :

1. Terwujudnya partisipasi dan komitmen para pemangku kepentingan dan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama standardisasi di tingkat bilateral, regional dan internasional.
2. Terwujudnya kerjasama standardisasi di tingkat nasional melalui kesepakatan kerjasama dengan Pemda dan Institusi terkait serta Perguruan Tinggi di dalam negeri.
3. Terwujudnya pemenuhan komitmen Indonesia terhadap ketentuan perjanjian TBT-WTO.
4. Terwujudnya peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum TBT WTO.
5. Terwujudnya awareness pendaftaran institusi penerbit kartu transaksi elektronik (IIN) sesuai standar ISO/IEC 7812.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja

Sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Tahun 2017 juga mengalami perubahan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi Kerjasama Standardisasi Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Customer Perspectives					
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	10	kerjasama
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	15	kerjasama
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	15	kerjasama
Internal Process Perspectives					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	85	kerjasama
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang STRACAP	5	Persentase kerjasama di bidang STRACAP yang disepakati di forum bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan	100	%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		6	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif di forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral	100	%
		7	Persentase draft standar internasional yang ditanggapi untuk mengakomodir kepentingan nasional	100	%
4	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	8	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70	%
5	Terakomodasinya kepentingan Indonesia di forum TBT WTO	9	Persentase penguatan posisi Indonesia melalui peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum TBT WTO (dispute, TPR, sidang reguler TBT)	100	%
		10	Persentase penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO	100	%
6.	Tertindaknya layanan jasa Issuer Identification Number	11.	Jumlah Layanan aplikasi IIN	10	Aplikasi
Learning and Growth Prospective					
7.	Meningkatkan kinerja sistem pengelolaan anggaran , sumber daya	12.	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100	%
		13.	Realisasi anggaran PKS	≥95	%
		14.	Persentase pencapaian kinerja PKS	90	%
		15.	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100	%
		16.	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100	%

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		17.	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKS	75	%
		18.	Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85	%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Pusat Kerjasama Standardisasi pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Customer Perspectives					
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8	kerjasama
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14	kerjasama
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	13	kerjasama
Internal Process Perspectives					

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68	kerjasama
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	5	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	48	%
Learning and Growth Perspectives					
4	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	6.	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang KSI yang meningkat kompetensinya	100	%
		7.	Realisasi anggaran Bidang KSI	≥95	%
		8	Persentase pencapaian kinerja Bidang KSI	90	%
		9	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100	%
		10	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100	%
		11	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang KSI	75	%

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri melaksanakan program Kesepakatan Kerjasama Standardisasi. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Kerjasama Standardisasi melalui :

1. Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi Kerjasama Bidang SPK di tingkat Nasional dengan kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

a. Pengembangan Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional

Pada tahun 2017 Bidang kerjasama standrdisasi dalam negeri telah melakukan pengembangan kerjasama standardisasi dengan beberapa Instansi, lembaga/Kementerian dan Perguruan Tinggi anatar lain:

1. Universitas Lambung Mangkurat
2. Universitas Indraprasta PGRI
3. Universitas Islam Malang
4. Universitas Tanjung Pura
5. Universitas Syiah Kuala
6. Universitas Nasional
7. Universitas Muhammadiyah Kupang
8. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
9. PT KAI
10. MoU BNSP, BIG dan KAN
11. BNN

b. Implementasi Kesepakatan Kerjasama Standardisasi Tingkat Nasional; Dalam melaksanakan ditindaklanjuti dari Kesepakatan Kerjasama Standardisasi di tingkat Nasional, Bidang Kerjasama Standardisasi dalam negeri telah melakukan kegiatan – kegiatan untuk mengisi hasil dari kesepakatan tersebut diantaranya ;

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 2017;

~~1.2.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 10 Maret 2017;

~~2.3.~~ Pelaksanaan Seminar Kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan Pemkab. Pamekasan pada tanggal 21 Maret 2017;

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 6 April 2017;

~~3.5.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Makassar pada tanggal 13 April 2017;

~~2.6.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 April 2017 serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Palembang pada tanggal 23 Mei 2017;

~~4.7.~~ Pelaksanaan Seminar Forum Standardisasi sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan PT. Pertamina (persero) di Kantor Pusat PT. Pertamina pada tanggal 8 September 2017.



5-8. Pelaksanaan Seminar Bulan Mutu Nasional di Makassar sebagai implementasi kerjasama standardisasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Oktober 2017;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Kerjasama Standardisasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Kerjasama Standardisasi maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Kerjasama Internasional yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Targ et	Realisasi
Customer Perspectives					
1	Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8 kerjasama	8 kerjasama
		2	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14 kerjasama	14 kerjasama
		3	Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	13 kerjasama	13 kerjasama
Internal Process Perspectives					
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4	Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68 kerjasama	68 kerjasama
3	Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK	5	Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	48 %	48 %
Learning and Growth Perspectives					
4	Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	6.	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang KSDN yang meningkat kompetensinya	100 %	100 %
		7.	Realisasi anggaran Bidang KSDN	≥95 %	≥98.6 %
		8	Persentase pencapaian kinerja Bidang KSDN	90	90
		9	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %	100 %

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		Targ et	Realisasi
		10	Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %	100 %
		11	Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang KSDN	75 %	75 %

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1 Meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8	100 %	100	100%	-
2. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14	75 %	100	100%	
3. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	2	100 %	100	100%	

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, Instansi, K/L dan Perguruan Tinggi bertujuan untuk pengembangan dan implementasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dapat meningkatkan daya saing produk dan memfasilitasi perdagangan Indonesia. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1;

1. Indikator Kinerja ; Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi

Adapun capaian Kinerja Sasaran1 adalah;

kegiatan implementasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam mengisi kesepakatan kerjasama antara BSN dengan mitra kerjasama. Sejumlah kegiatan tersebut antara lain;

~~3-9.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Universitas Pancasakti Tegal di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 2 Februari 2017;

~~6-10.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Malang, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 10 Maret 2017;

~~7-11.~~ Pelaksanaan Seminar Kesiapan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pamekasan sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan Pemkab. Pamekasan pada tanggal 21 Maret 2017;

~~12.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta implementasi kegiatan berupa Sosialisasi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Biro Hukum Organisasi dan Humas BSN pada tanggal 6 April 2017;

~~8-13.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Makassar pada tanggal 13 April 2017;

~~9-14.~~ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 18 April 2017 serta implementasi pendirian Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Palembang pada tanggal 23 Mei 2017;

- ~~10-15.~~ Pelaksanaan Seminar Forum Standardisasi sebagai implementasi Kesepakatan Bersama antara BSN dengan PT. Pertamina (persero) di Kantor Pusat PT. Pertamina pada tanggal 8 September 2017.
- ~~11-16.~~ Universitas Muhammadiyah Sukabumi dilaksanakan berupa Workshop dengan tema Peran Serta Akademisi Dalam Proses Pengembangan Standar pada tanggal 14 Maret 2017;
- ~~12-17.~~ Universitas Muhammadiyah Magelang berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 5 April 2017;
- ~~13-18.~~ Universitas Negeri Yogyakarta berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 6 April 2017;
- ~~14-19.~~ Universitas Syiah Kuala Aceh berupa Kuliah Umum yang dilakukan pada tanggal 19 April 2017;
- ~~15-20.~~ Universitas Brawijaya Malang dilakukan berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 3 Mei 2017;
- ~~16-21.~~ Universitas Muhammadiyah Malang berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 4 Mei 2017;
- ~~17-22.~~ Universitas Indraprasta PGRI yang berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Mendukung Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 6 Juni 2017;
- ~~18-23.~~ Universitas Pancasila yang berupa Seminar dengan tema Peranan Akademisi Dalam Mendukung Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian pada tanggal 13 Juni 2017.

SASARAN 2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
4. Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	100%	100%	100%		

SASARAN 4 Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
8. Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	48%	48%	100 %	70 %	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK yang disepakati di tingkat Nasional ditetapkan melalui realisasi rencana program kerjanya berupa kegiatan – kegiatan implementasi kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi seperti Worksop SNI, Seminar Standardisasi, Kuliah Umum, SNI corner dan Pelatihann – pelatihan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2017, Pusat Kerjasama Standardisasi dengan pagu anggaran adalah sebesar **Rp 6.069.666.000,-** dan realisasi anggaran Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017 adalah sebesar **Rp 5.971.478.615** sebesar **98.4 %**.

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Kerjasama Standardisasi TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.2
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Kerja Sama Standardisasi TA 2017

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2016		%
		Pagu	Realisasi	
3557.01	Kesepakatan Kerjasama Standardisasi	6,021,223,000	5,939,017,365	98.6
3557.02	Layanan Nomor Identifikasi Penerbit Kartu	48,443,000	32,461,250	67.01
	Jumlah	6,069,666,000	5,939,017,365	98.4

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Kerjasama Standardisasi Internasional Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Kerjasama Standardisasi-Badan Standardisasi Nasional

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja untuk mendukung tercapainya target kinerja Pusat Kerjasama Standardisasi.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Iskandar Novianto
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Konny Sagala
Jabatan : Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Konny Sagala

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama

R. Iskandar Novianto



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA BIDANG KERJASAMA STANDARDISASI DALAM NEGERI
PUSAT KERJASAMA STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Meningkatkan penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk penerapan standar oleh industri/organisasi	8 kerjasama
	2 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI produk unggulan nasional	14 kerjasama
	3 Jumlah kerjasama yang diimplementasikan untuk mendukung penerapan SNI yang beredar di pasar retail	13 kerjasama
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4 Jumlah kerjasama yang dimanfaatkan untuk mendukung perumusan dan penerapan SNI untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	68 kerjasama
3 Meningkatkan kualitas kerjasama bidang SPK	5 Persentase tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang SPK yang harus dipenuhi	70 %
4 Terlaksananya layanan jasa Issuer Identification Number (IIN)	6 Jumlah layanan aplikasi IIN	10 Aplikasi
Learning and Growth Perspectives		
5 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PKS yang profesional	7 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PKS yang meningkat kompetensinya	100 %
	8 Realisasi anggaran KSDN	≥95 %
	9 Persentase pencapaian kinerja KSDN	90 %
	10 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %
	11 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %
	12 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi KSDN	75 %
	13 Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan IIN (skala 1-100)	85 nilai

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri	1,223,329,000

Pihak Kedua

Konny Sagala

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama

R. Iskandar Novianto

